

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai pasal tersebut dijelaskan jika desa memiliki otoritas untuk mengelola urusan pemerintahannya serta memperhatikan kepentingan masyarakatnya sendiri. Melalui pemberian kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan untuk secara optimal memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan melalui pengelolaan potensi yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2006) dalam (Juliarso, A & Hidayat, 2017).

Salah satu potensi desa yang dapat menjadi pendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan desa wisata. Desa wisata dalam (Lestari et al., 2023) merupakan suatu area perdesaan yang menghadirkan nuansa autentik kehidupan perdesaan, mencakup aspek-aspek seperti budaya sosial, adat istiadat, rutinitas sehari-hari, sejarah, arsitektur desa yang unik, kegiatan ekonomi yang menarik dan unik, serta berpotensi untuk menyediakan berbagai layanan

termasuk akomodasi, kuliner, minuman, dan layanan lainnya. Perwujudan desa wisata ditunjukkan melalui gaya hidup serta kualitas hidup masyarakatnya. Melalui pengembangan desa wisata, diharapkan akan memberikan manfaat positif kepada masyarakat melalui pembukaan peluang kerja baru yang akan mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa pengembangan desa wisata berpotensi dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi pariwisata di daerah perdesaan. Selain itu, hal ini juga dapat mendukung pelestarian lingkungan, termasuk lanskap alam, area persawahan, sungai, dan danau. Pengembangan wisata menjadi salah satu komponen dari strategi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat dan memberikan perubahan positif yang signifikan terutama dalam menyumbang pendapatan nasional.

Menurut Damanik dalam (Ismawati, 2020) menyebutkan dalam pengembangan pariwisata didukung oleh tiga faktor diantaranya yang pertama, budaya perdesaan yang lebih kental daripada wilayah perkotaan, yang mana masyarakat perdesaan masih memegang erat tradisi maupun ritual budaya leluhur. Kedua, dibandingkan dengan kawasan perkotaan sebagian besar lingkungan fisik wilayah perdesaan masih alami tidak banyak terpapar oleh berbagai macam polusi. Ketiga, adanya perkembangan ekonomi cenderung berjalan lambat sehingga

membutuhkan pengembangan pariwisata perdesaan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada.

Sedangkan Hadiwijaya (2012) dalam (Mashur Hasan Bisri et al., 2023) juga menjelaskan hal yang sama terkait persyaratan dalam pembentukan desa wisata yaitu dengan 7 faktor yaitu aksesibilitas yang baik, memiliki objek yang menarik, dukungan dari aparat & masyarakat desa, keamanan, akomodasi, iklim, serta berhubungan dengan objek wisata lain. Dalam implementasi pengembangan desa wisata penting untuk memastikan bahwa kebutuhan para wisatawan dapat terpenuhi melalui penggabungan daya tarik wisata, akomodasi wisata, dan fasilitas pendukung pariwisata. Hal itu dilakukan dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini ke dalam kehidupan sosial masyarakat yang terstruktur dan selaras dengan tata cara serta tradisi yang ada (Suprpto et al., 2023).

Dalam kegiatan perekonomian desa, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan program untuk membentuk institusi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha yang menaungi unit usaha perekonomian desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibentuk, dikelola, dan dikembangkan agar membantu menumbuhkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Maryunani (2008) dalam (Wirandini & Prasetyia, 2022) BUM Desa adalah entitas usaha yang berada di tingkat desa, pengelolaannya dilakukan kolaboratif antara pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat, terbentuk dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa dengan tujuan utama meningkatkan integritas sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.

Melalui program yang ada, kepala desa selaku pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa diwajibkan untuk dapat memaksimalkan penggunaannya dengan mengelola segala potensi yang dimiliki setiap daerah perdesaan. (Mashur Hasan Bisri et al., 2023). Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa perlu memiliki kesiapan yang matang untuk mengelola berbagai unit usaha di suatu desa. Kesiapan dapat dipertimbangkan dari beragam inovasi serta kemampuan BUM Desa dalam merancang strategi.

Dikutip dari (Mashur Hasan Bisri et al., 2023) menurut Suryono (2019) strategi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk merencanakan dan memanfaatkan beragam sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Strategi dinyatakan efektif apabila diukur berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk kemampuannya untuk berfungsi dengan baik, diterima secara politis oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*), sejalan dengan landasan filosofis dan nilai-nilai yang menjadi asas organisasi, menaati etika, menjunjung tinggi prinsip moralitas, dan peraturan hukum yang berlaku dalam organisasi, serta mampu mengatasi isu-isu strategis yang perlu diatasi Bryson (2005:69-70) dalam (Lestari et al., 2023).

Maka, dalam menjalankan tugasnya Badan Usaha Milik Desa berperan untuk membantu pemerintah desa menjalankan fungsinya dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat dengan menyediakan beragam jenis fasilitas jasa, perdagangan, dan berkontribusi pada pengembangan perekonomian desa. Hal tersebut bertujuan guna eksistensi serta daya kerja Badan Usaha Milik Desa mampu

berkontribusi penting untuk mengoptimalkan upaya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

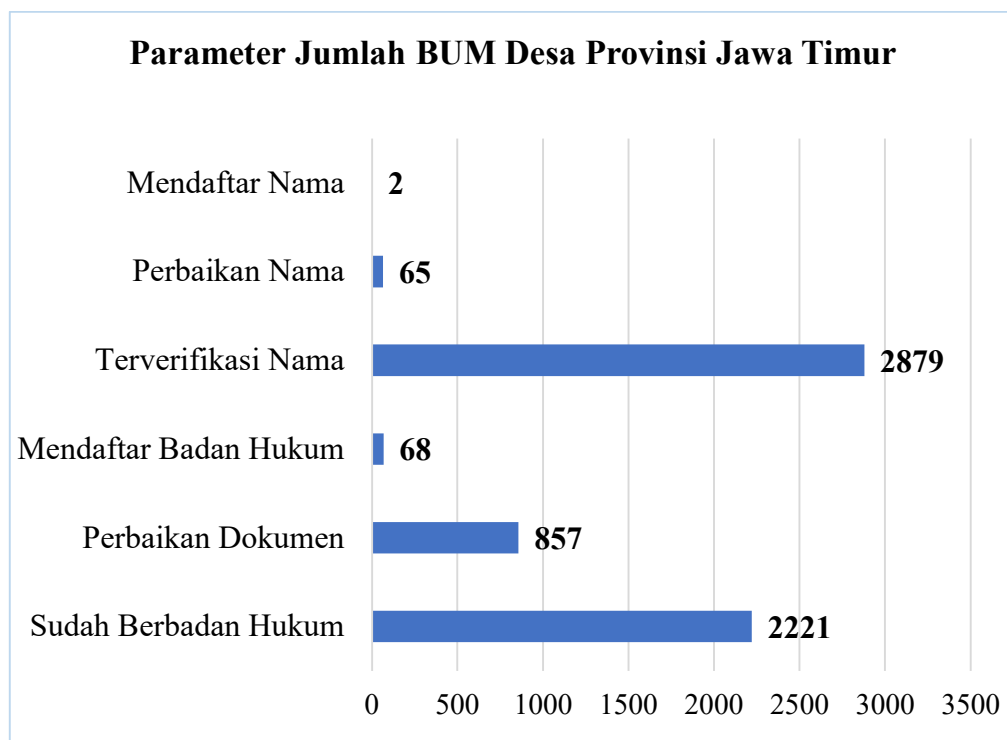
Secara nasional berdasarkan informasi di portal resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), tercatat bahwa total keseluruhan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Di tahun 2019 tercatat 50.199 unit BUM Desa kemudian bertambah menjadi 51.174 unit pada tahun 2023. Total 16.326 BUM Desa telah resmi berbadan hukum, sementara sekitar 34.848 BUM Desa masih dalam tahap registrasi diantaranya 54 BUM Desa masih mendaftarkan nama, 1.078 BUM Desa melakukan perbaikan nama, 27.161 BUM Desa sudah terverifikasi nama, 712 BUM Desa masih dalam proses mendaftar badan hukum, dan 5.842 BUM Desa melakukan perbaikan dokumen.

Provinsi Jawa Timur berdasarkan data menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 memiliki total keseluruhan desa mandiri terbesar di Indonesia. Tujuan utama dalam mewujudkan desa mandiri adalah menciptakan kemandirian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu desa agar tidak hanya bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Total desa mandiri di Jawa Timur tercatat yakni 2.800 desa, 3.674 desa mencapai status sebagai desa maju dan 1.247 desa masih dalam kategori desa berkembang.

Hal tersebut dituturkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara perayaan ulang tahun ke-62 Bank Jatim di Grand City, Surabaya yakni:

“**harian.disway.id** - Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen desa mandiri ada di Jatim,” (Sumber: <https://harian.disway.id/read/720542/hebat-seperempat-desa-mandiri-nasional-ada-di-jatim>, diakses pada 23 Oktober 2023).

Adapun berdasarkan data dari website Sistem Informasi Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDDT) Provinsi Jawa timur memiliki total keseluruhan Badan Usaha Milik Desa yaitu 6.092 unit.



Gambar 1.1 Parameter Jumlah BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
 Sumber: Kemendesa PDDT, diakses pada 02 September 2023 (diolah peneliti)

Pada gambar 1.1 tersebut memaparkan Parameter Jumlah BUM Desa di Provinsi Jawa Timur di mana sebagian dari total keseluruhan BUM Desa masih ada BUM Desa yang belum resmi berbadan hukum dan sedang dalam tahapan proses registrasi, 2 unit BUM Desa masih pada proses mendaftarkan nama, 65 unit BUM Desa melakukan perbaikan nama, sedangkan yang sudah terverifikasi nama mencapai 2.879 unit BUM Desa, 68 unit BUM Desa dalam tahapan mendaftarkan badan hukum, 857 melakukan perbaikan dokumen, serta yang sudah berbadan hukum atau resmi berjumlah 2.221 unit BUM Desa.

Kabupaten Jombang berada di Provinsi Jawa Timur memiliki 21 kecamatan, 4 kelurahan serta 302 desa. Dibutuhkan adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Jombang, berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatasi kompleksitas perkembangan masyarakat desa yang semakin meningkat. Dengan total keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Jombang, sebanyak 284 desa di antaranya telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Adapun 62 desa masuk dalam kategori BUM Desa maju dan telah resmi terdaftar badan hukum yang sah.

Adanya pembentukan BUM Desa di Kabupaten Jombang sesuai dengan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang ditegaskan bahwa akan selalu berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dan BUM Desa guna mewujudkan kemakmuran desa. Pada acara Sosialisasi Pemberdayaan BUM Desa yang diadakan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Kepala DPMD Jombang menjelaskan, yakni:

“**mediapetisi.net** - BUMDes di Kabupaten Jombang ada beberapa bidang diantaranya bidang pertanian, bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bidang lainnya sehingga perlu dilakukan pemberdayaan baik dari sisi ekonomi maupun sisi lainnya...”, tutur Sholahuddin Hadi Sucipto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang (Sumber: <https://mediapetisi.net/2022/06/09/guna-terwujudnya-program-ekonomi-kerakyatan-dpmd-jombang-sosialisasikan-pemberdayaan-bumdes/>, diakses pada 19 Oktober 2023).

Salah satu wilayah di Kabupaten Jombang adalah Kecamatan Bareng Bareng. Data berikut adalah terkait jumlah dusun, RW, dan RT berdasarkan desa atau kelurahan di Kecamatan Bareng, yakni:

Tabel 1. 1 Jumlah Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Bareng

Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kebondalem	5	10	30
Mundusewu	6	8	21
Pakel	3	10	30
Karangan	5	13	30
Ngampung	3	7	20
Jenisgelaran	3	5	13
Bareng	8	17	57
Tebel	4	7	22
Mojotengah	4	8	27
Banjaragung	4	11	26
Nglebak	1	5	10
Pulosari	3	8	23
Ngrimbi	5	4	17
Jumlah	54	113	326

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan jika Kecamatan Bareng memiliki jumlah 13 desa, dan pada setiap desa tersebut sudah memiliki BUM Desa dengan kategori maju dan berkembang. Berikut merupakan data mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Bareng:

Tabel 1. 2 Data BUM Desa se-Kecamatan Kecamatan Bareng

No.	Desa/Kelurahan	Nama BUM Desa	Tahun	Status BUM Desa
1.	Desa Kebondalem	Sejahtera	2015	Berkembang
2.	Desa Mundusewu	Rukun Sejahtera	2015	Berkembang
3.	Desa Pakel	Astana Arta	2015	Berkembang
4.	Desa Karangn	Mitra Sejahtera	2015	Berkembang
5.	Desa Ngampungan	Maju Sejahtera	2015	Maju
6.	Desa Jenisgelaran	Sumber Makmur	2015	Berkembang
7.	Desa Bareng	Sari Makmur	2015	Maju
8.	Desa Tebel	Bumdesa Maju Bersama	2015	Berkembang
9.	Desa Mojotengah	Sumber Makmur	2015	Berkembang
10.	Desa Banjaragung	Maju Makmur	2015	Berkembang
11.	Desa Nglebak	Mandiri Sejahtera	2015	Berkembang
12.	Desa Pulosari	BUM Desa Sari Artha	2015	Maju
13.	Desa Ngrimbi	Arimbi Jaya Ngrimbi	2015	Maju

Sumber: Data Desa Center Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, diakses pada 19 Oktober 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kecamatan Bareng yakni 9 desa diantaranya Desa Kebondalem, Desa Mundusewu, Desa Pakel, Desa Karang, Desa Ngampungan, Desa Jenisgelaran, Desa Bareng, Desa Tebel, Desa Mojotengah, Desa Banjaragung, Desa Nglebak, Desa Pulosari, serta Desa Ngrimbi sudah memiliki BUM Desa dengan statusnya yang masih berkembang. Sedangkan 4 desa lainnya, seperti Desa Ngampungan, Desa Bareng, Desa Pulosari, dan Desa Ngrimbi telah masuk dalam kategori BUM Desa maju.

Desa Ngampungan menjadi salah satu desa dengan kategori BUM Desa yang berstatus maju di Kecamatan Bareng. Selain itu, Desa Ngampungan juga merupakan desa maju yang kemudian berkembang menjadi desa wisata di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang (sabdopalon.jombangkab.go.id). Secara geografis Desa Ngampungan bersebelahan dengan Kecamatan Bareng, dengan jarak sekitar 25 km dari pusat Kota Jombang, yang wilayahnya memiliki luas 4,68 km² dan jumlah populasi sebanyak 3.924 jiwa. Mulai tahun 2016 Desa Ngampungan telah membentuk Badan Usaha Milik Desa bernama “Maju Sejahtera”, kantornya berlokasi di Jalan Jobranti No. 1 Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pendirian BUM Desa “Maju Sejahtera” Desa Ngampungan didasari oleh Peraturan Desa Ngampungan Nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Maju Sejahtera”.

Berkenaan slogannya yaitu “Guyub Rukun Membangun Desa”, Desa Ngampungan yang merupakan desa wisata berbasis ekonomi kerakyatan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Desa

tersebut merupakan desa wisata terbaik dari Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dibuktikan dari pencapaian Wisata Pandansili yang berhasil masuk dalam daftar 300 desa wisata unggulan di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. Pada periode sebelumnya Desa Ngampungan juga berhasil meraih prestasi yang sama, memenangkan penghargaan sebagai desa yang unggul dalam pengelolaan pariwisata di wilayah Kabupaten Jombang. Tahun 2024 Desa Ngampungan juga memenangkan lomba wisata desa, diadakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Jombang meraih gelar juara 1 sebagai desa wisata terbaik di Kabupaten Jombang.



Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Desa Terbaik dalam Pengelolaan Wisata se- Kabupaten Jombang 2022

Sumber: BUM Desa “Maju Sejahtera” Desa Ngampungan, 06 September 2023



Gambar 1.3 Peraih Penghargaan Desa Terbaik dalam Pengelolaan Wisata se-Kabupaten Jombang 2022

Sumber: Sabdopalon.jombangkab.go.id, diakses pada 06 September 2023

Dalam rencana kerja BUM Desa, fokus utama perusahaan secara umum adalah memperkuat BUM Desa “Maju Sejahtera” sebagai perusahaan yang sehat dengan reputasi unggul didukung oleh modal yang cukup, sumber daya manusia terampil dan berkualitas tinggi, serta budaya perusahaan yang kokoh, bertujuan agar memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Daerah Jombang merespons secara aktif terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diinisiasi secara langsung oleh pemerintah pusat, mengalokasikan anggaran senilai Rp. 100.000.000,00 menjadi dana stimulus yang diberikan kepada setiap desa termasuk Desa Ngampungan.

Dana Operasional diberikan oleh pemerintah digunakan BUM Desa “Maju Sejahtera” untuk mengelola unit – unit usaha yang dimilikinya yaitu yang pertama

terdapat Unit Wisata Pandansili. Kedua, Unit Simpan Pinjam. Ketiga, Unit Persewaan Molen. Kemudian yang terakhir adalah Unit BRI Link. Unit Wisata Pandansili adalah yang paling menonjol diantara keempat unit usaha yang dimiliki. Unit wisata tersebut merupakan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara maksimal di Desa Ngampungan melalui wisata kolam renang didampingi oleh paket wisata edukasi dengan kondisi geografis kolam yang dikelilingi lahan pertanian penduduk. Keberadaan potensi wisata tersebut dianggap sebagai faktor utama guna meningkatkan pendapatan desa serta peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, seperti pemanfaatan usaha UMKM, pengelolaan jasa parkir dan sebagainya.

Unit Wisata Pandansili merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Desa Ngampungan dan menjadi salah satu potensi unggulan yang dijadikan sebagai *icon* Desa Ngampungan mulai dibuka pada bulan Maret tahun 2020. Awal mula kawasan Pandansili ialah hasil pengeboran mata air zaman kolonial Belanda yang dijadikan sebagai tempat pemandian dengan nama *Het Koloniaal Badhuis*. Kolam tersebut digunakan oleh Belanda untuk keperluan pabrik karet yang ada pada saat itu. Sedangkan sumber air alaminya digunakan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan pada saat pemerintahan Belanda.

Setelah lama terbengkalai, perangkat desa bersama warga sekitar kemudian melakukan upaya untuk mengoptimalkan tempat pemandian tersebut dengan merenovasi dan melakukan pembersihan di lingkungan sekitar sumber air dan kolam penampungan air, sehingga dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah bagi orang – orang yang pernah berkunjung pada tahun – tahun awal pendirian wisata.

Pandan berarti tumbuhan Pandan sedangkan Sili berarti ikan, karena dulu banyak terdapat ikan dibawah pohon pandan yaitu ikan Sili.

Pada tahun 2021 Kementerian Desa dan Tertinggal memberikan bantuan keuangan kepada Wisata Pandansili yang digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana wisata. Wisata Pandansili menawarkan berbagai macam fasilitas dan kegiatan yang dapat dinikmati oleh pengunjung dengan mengusung konsep wisata *outdoor*. Dengan salah satu keunggulannya yaitu adanya kolam renang berukuran luas dengan air yang jernih dan bersih tanpa kaporit diperoleh dari sumber mata air secara langsung. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung lain diantaranya spot foto yang disediakan oleh pengelola Wisata Pandansili, toilet umum, mushola, gazebo, area permainan anak, pujasera, dan Wi-Fi area.

BUM Desa sebagai entitas usaha yang diberikan kewenangan oleh desa untuk mengelola unit Wisata Pandansili, dalam pengelolaannya juga menjalin kerjasama dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) sebagai pelaksana. Hal tersebut disebabkan karena BUM Desa “Maju Sejahtera” belum memiliki anggota yang banyak untuk mengelola wisata secara mandiri. Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 pendekatan yaitu insiatif masyarakat setempat dan pendekatan yang sengaja dibentuk oleh instansi kepariwisataan daerah (Gel, 2010) dalam (Mahmudah et al., 2023). Di Desa Ngampungan Pokdarwis tersebut dibentuk oleh pemerintah desa bersama BUM Desa yang keanggotaannya merupakan unsur warga masyarakat Desa Ngampungan sendiri.

Besarnya potensi wilayah serta dukungan pemerintah melalui dana desa menjadi faktor pendukung BUM Desa “Maju Sejahtera” dalam mewujudkan desa mandiri melalui pengembangan desa wisata. Dalam upaya membangun sebuah desa mandiri, Wisata Pandansili menjadi salah satu capaian jangka panjang dari Pemerintah Desa Ngampungan terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi. Peluang Sumber Daya Manusia atau penduduk di Desa Ngampungan yang padat dengan kemampuan yang dimiliki, diharapkan dapat mengubah kegiatan ekonomi yang sebelumnya hanya terpusat pada sektor pertanian. Sehingga dengan adanya wisata baru yaitu Unit Wisata Pandansili melalui BUM Desa sebagai pengelolanya, mampu memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat Desa Ngampungan.

Adanya unit wisata tersebut dapat berkontribusi menjadi pendongkrak peningkatan perekonomian desa, yang mana mampu memberikan pemasukan tertinggi BUM Desa “Maju Sejahtera” terhadap peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kemakmuran masyarakat sekitar, melalui keuntungan bagi pelaku UMKM di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Tabel 1. 3 Jumlah Pengunjung Wisata Pandansili

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2020	21.666
2.	2021	50.948
3.	2022	75.850
4.	2023	55.543

Sumber: BUM Desa “Maju Sejahtera”, 05 Maret 2024 (diolah peneliti)

Menurut tabel 1.3 di atas dapat dipahami jika Wisata Pandansili adalah objek wisata yang menarik perhatian wisatawan, yang mana pada setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung yaitu 21.666 pengunjung dan meningkat secara signifikan menjadi 50.948 pengunjung, kemudian di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 75.850 pengunjung serta sempat menurun di tahun 2023 menjadi 55.543 pengunjung.

Maka, BUM Desa harus selalu berupaya melakukan inovasi dan mempertahankan kelayakan, serta fasilitas yang memadai bagi pengunjung dengan menggunakan strategi yang harus direncanakannya agar keberadaan Wisata Pandansili tidak menurunkan pendapatannya ditengah maraknya tumbuh wisata – wisata baru baik wisata desa maupun milik pribadi di daerah sekitar.

Peneliti tertarik mengetahui lebih jauh strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” dalam upaya pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengambil judul **“Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” Dalam Upaya Pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” dalam upaya pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” dalam upaya pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menyajikan gambaran secara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai acuan di masa mendatang atau sebagai pembanding penelitian terkait dengan Administrasi Publik, terutama dalam mengetahui tentang strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” dalam upaya pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Studi ini diharapkan dapat membantu para peserta dalam mengkaji ulang teori dan doktrin yang telah mereka temui selama studi mereka serta menjadi panduan untuk menerapkan gelar sarjana.

2. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” Desa Ngampungan

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan solusi dalam memecahkan masalah pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” Desa Ngampungan.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tambahan bagi perpustakaan, serta sebagai pelengkap literatur dan referensi penelitian terkait di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.